

DINAMIKA POLITIK ERA JOKOWI DAN LUNTURNYA NILAI DEMOKRASI DITINJAU BERDASARKAN ETIKA SPINOZA

Gabriel Albertus Nong Ovi¹, Abraham Daud Atani Manilet², Kristanto Fredinando Gadu³,
Benyamin Ampolo⁴

gabrielalbertus83@gmail.com¹, kristantogadu2@gmail.com³, benyAmpolo02@gmail.com⁴

Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

ABSTRAK

Dinamika politik era Jokowi menuai kritik karena sistem pemerintahan yang sangat kontroversial yakni, suatu bentuk pemerintahan yang bersifat oligarkis. Bentuk pemerintahan yang oligarkis dapat menyebabkan lunturnya nilai demokrasi yang berdampak pada tidak demokratisnya sistem pemerintahan serta tidak etisnya politik yang dijalankan. Tulisan ini mau menelusuri isu-isu yang berkembang saat ini yakni apakah masa pemerintahan Jokowi merusak sistem demokrasi dan melanggar etika politik? Tidak etisnya suatu pemerintahan demokrasi merupakan suatu tindakan yang melanggar nilai-nilai demokrasi. Etika dimengerti sebagai refleksi filosofis tentang moral. Jadi, etika lebih merupakan wacana normatif yang membahas tentang baik atau jahat. Etika juga lebih dipandang sebagai seni hidup yang mengarah kepada kebahagiaan dan kebijaksanaan. Dalam kaitannya dengan etika politik dalam tatanan suatu negara yang menganut sistem politik demokrasi maka etika Spinoza menawarkan pandangan yang unik tentang kebahagiaan dan kebaikan. Ia berpendapat bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat dicapai melalui pemahaman yang benar tentang alam semesta dan keberadaan manusia di dalamnya. Menurutnya, kebahagiaan bukanlah hasil dari keinginan dan emosi yang lepas kendali tetapi berasal dari pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang realitas. Dalam kaitannya dengan politik, emosi dapat menjadi penyebab dari kecurangan atau suatu perbuatan yang immoral karena emosi dapat menimbulkan ambisi untuk menghancurkan tatanan yang baik demi tujuan untuk kebikan dirinya sendiri. Emosi dalam kaitannya dengan etika juga dapat membuat seorang politisi untuk melakukan agitasi demi tercapainya tujuan dalam hal ini keinginan akan kekuasaan.

Kata Kunci: Pemerintahan Jokowi, Etika Politik, Dan Etika Spinoza.

PENDAHULUAN

Dinamika politik yang seringkali menimbulkan konflik tidak pernah luput dari suatu penilaian etis. Praktik melakukan penilaian etis tersebut yang dinamakan etika politik. Bila dipahami secara komprehensif etika politik menggabungkan antara etika dan politik tanpa mengandaikan bahwa etika dapat melenyapkan konflik antara kedua hal tersebut. Konflik antara etika dan politik tidak dapat dipahami secara konvensional, karena politik sebagai dunia kekuasaan murni diatur oleh asumsi-asumsi kebijaksanaan, sedangkan etika sebagai dunia prinsip murni diatur oleh imperatif-imperatif moral.

Imperatif-imperatif moral dalam berpolitik perlu hadir dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi, karena sistem demokrasi politik yang memiliki imperatif moral tersebut akan melahirkan suatu pemerintahan yang demokratis. Hal ini jika dikaitkan dengan etika yang digagaskan oleh filsuf rasionalis Spinoza, maka akibat dari sistem demokrasi yang disalahgunakan yang bergantung pada suatu sebab tertentu tersebut yakni dalam hemat penulis merupakan sebab dari kekuasaan pejabat pemerintahan yang berkepanjangan. Karena kekuasaan yang panjang tersebut maka lahirlah sesuatu yang tidak etis dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi dan menimbulkan menurunnya indeks demokrasi dan terjadinya pemerintahan yang kurang demokratis.

Penulisan ini memberikan suatu hubungan atau kergantungan timbal balik antara etika dan demokrasi dalam proses politik. Etika politik memberikan dukungan bagi politik demokrasi dalam berbagai aspek. Kriteria yang ditawarkan etika politik yakni dengannya

warga negara bisa menilai tindakan-tindakan pejabat pemerintah dan meminta pertanggung jawaban dari praktek politik yang keliru dan menyebabkan kurang demokratisnya suatu pemerintahan. Memahami etika politik dalam tatanan negara yang menganut sistem politik demokrasi maka etika Spinoza menawarkan pandangan yang unik tentang kebahagiaan dan kebaikan. Ia berpendapat bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat dicapai melalui pemahaman yang benar tentang alam semesta dan keberadaan manusia di dalamnya. Menurutnya, kebahagiaan bukanlah hasil dari keinginan dan emosi yang lepas kendali tetapi berasal dari pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang realitas.

Ketika Spinoza berbicara tentang hukum alam, ia tidak berpikir tentang hukum moral yang menjawab sifat manusia, tetapi yang mewajibkan dia secara moral sebagai makhluk yang bebas untuk bertindak dalam cara tertentu: ia memiliki cara bertindak yang mana setiap hal yang terbatas, termasuk manusia, ditentukan oleh alam untuk dikejar. Yang saya maksud dengan hak dan tata cara alam hanya hukum-hukum alam yang dengannya kita menganggap setiap individu dikondisikan oleh alam agar dapat hidup dan bertindak dengan cara tertentu. Spinoza dalam etikanya, ia menggunakan suatu metode geometris (*more geometrico*) yang berarti bahwa sesuatunya dapat dijelaskan seperti ilmu pasti. Ia membuat analisis geometris atas nafsu-nafsu, keburukan, dan kegiatan manusia untuk menjelaskan etikanya.

METODE

Penulisan ini menggunakan metode kepustakaan atau library search. Penelitian perpustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang terdapat di perpustakaan, sehingga data yang diperoleh dengan jalan penelitian perpustakaan tersebut dijadikan dasar bagi kegiatan atau praktik penelitian. Penelitian perpustakaan adalah penelitian yang berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Politik Era Jokowi Dan Implikasinya Terhadap Etika Politik Dan Demokrasi

Dinamika politik era Jokowi menuai kritik karena sistem pemerintahan yang sangat kontroversial yakni, suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik berada di tangan minoritas kecil atau bersifat oligarkis. Karena bentuk pemerintahan yang oligarkis tersebut menyebabkan lunturnya nilai demokrasi yang berdampak pada tidak demokratisnya sistem pemerintahan yang dijalankan. Jokowi tidak memandang demokrasi sebagai ikhwal yang harus diperjuangkan, melainkan demokrasi hanya sebagai suatu instrumen atau alat untuk memenangkan pemilu. Akibat dari politik mediasinya yang memandang demokrasi sebagai instrumen tersebut, demokrasi Indonesia pasca Orde Baru mengalami kemunduran sampai pada titik terendah.

Ketika Pilpres 2019 dan Jokowi menjadi presiden Republik Indonesia periode kedua, ia pernah mengungkapkan di depan Istana Kepresidenan bahwa "Kita ingin membangun sebuah demokrasi gotong royong. Jadi perlu saya samapaikan bahwa di Indonesia ini tidak ada yang namanya oposisi seperti di negara lain. Demokrasi kita ini adalah demokrasi gotong royong." janji kampanye tentang pemerintahan yang 'bersih' dan 'profesional' tidak menjadi suatu komitmen yang dipegang melainkan, memberikan posisi strategis kepada kepentingan oligarki dan mengindikasikan keputusannya dilandasi oleh partai pendukungnya. Di sisi lain, ada suatu politik balas budi sebagai cara untuk memuluskan kekuasaannya.

Hal lainnya yang menyebabkan demokrasi di Indonesia mengalami regresi yang dalam tinjauan Thomas power ada beberapa problematika yang menjadi penyebab demokrasi mengalami regresi. Masalah pertama disebabkan ketidakadilan hukum atau lawfare yang dilihat sebagai suatu penyalahgunaan hukum dan lembaga penegak hukum oleh aktor politik untuk tujuan politik. Taktik politisasi hukum ini, melemahkan perlindungan hak asasi manusia, merusak supremasi hukum, dan menyudutkan kerja-kereja yang dilakukan para aktivis masyarakat sipil terutama yang berposisi. Penyebab regresi demokrasi yang kedua adalah keberpihakan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus yang melibatkan pemegang kekuasaan, terutama politisi partai politik. Penyebab terakhir dalam pandangan Power adalah manipulasi peraturan atau perubahan aturan-aturan hukum untuk mendorong terjadinya penggelembungan kekuasaan eksekutif. Segala bentuk fenomena-fenomena yang tidak demokratis ini terjadi selama masa pemerintahan Jokowi.

Bukti bahwa demokrasi mengalami kemunduran dan kalahnya negara hukum di Indonesia dalam era kepresidenan Jokowi dapat dilihat dalam tinjauan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH), yang menerima sebanyak 1444 pengaduan dengan jumlah pencari keadilan sebanyak 121571 orang. LBH menangani lebih lanjut 165 kasus untuk ditangani secara struktural, dengan total 8958 pencari keadilan. Sedangkan di tahun 2016 melihat semakin menguatnya oligarki, mudurnya demokrasi, dan kalahnya negara hukum di Jakarta yang sedikit banyak mewakili kondisi di Indonesia. Negara hanya dikuasai oleh kepentingan segelintir pemodal yang bersekutu dan berkolusi dengan pengusaha. Kecurangan dan ketidakadilan yang dijalankan oleh sekelompok elit politik dan sekelompok oligarki tersebut mengurangi nilai demokrasi dan menghilangkan nilai etika dalam berpolitik yang mengakibatkan demokrasi mengalami suatu regresi.

2. Pengertian Etika Dan Etika Politik

Etika dapat dilihat sebagai suatu tindakan manusia sebagai makhluk berakal budi yang harus bertindak sesuai dengan hati nurani sehingga identik dengan kepribadiannya sebagai makhluk rasional. Istilah etika sering disama artikan dengan kata moral, sehingga perlu untuk melihat perbedaan dari kedua term tersebut.

Etika berasal dari kata *éthos*, yang berarti "kualitas suatu sifat" digunakan juga istilah *éthos*, yang berarti kebiasaan. Makna *éthos* adalah suatu cara berpikir dan merasakan, cara bertindak dan bertingkah laku yang memberi ciri khas kepemilikan seorang terhadap kelompok. Sedangkan istilah moral berasal dari kata latin "*moralis*" (*mos*, *moris* yang berarti adat, kebiasaan). Etika dimengerti sebagai refleksi filosofis tentang moral. Jadi etika lebih merupakan wacana normatif (tidak selalu harus berupa perintah yang mewajibkan, karena bisa juga kemungkinan bertindak) yang membahas tentang baik atau jahat. Etika lebih dipandang sebagai seni hidup yang mengarah kepada jebahagiaan dan kebijaksanaan. Sedangkan moral selalu dikaitkan dengan kewajiban khusus, dihubungkan dengan norma sebagai cara bertindak yang berupa tuntutan yang dapat bersifat relatif atau mutlak. Jadi etika dapat berupa kebiasaan yang dilakukan dengan berpikir dan beretindak sesuai dengan hati nurani dan dalam praktiknya selalu berkaitan dengan penilaian etis atas tindakan yang dilakukan. Sedangkan moral selalu berkaitan dengan norma-norma yang ditetapkan sebagai suatu nilai yang wajib ditaati sehingga tindakan yang dilakukan tidak menyimpang dari norma-norma hukum yang ditetapkan.

Dengan kedua term etika dan moral ini, lebih lanjut perlu dipahami suatu etika khusus yang akan dibahas dalam hal ini berkaitan dengan etika politik. Etika politik merupakan filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia. Etika politik

berkaitan dengan dua cabang utama filsafat yakni filsafat teoretis dan filsafat praktis. Filsafat teoretis berkaitan dengan apa yang ada sedangkan filsafat praktis berkaitan dengan bagaimana seorang individu selayaknya bersikap terhadap realitas apa yang ada. Etika politik berkaitan dengan filsafat yang langsung mempertanyakan praksis manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dan berelasi dengan sesamanya. Etika politik selalu berkaitan dengan etika sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga para pimpinan, pemegang kekuasaan atau pejabat publik tidak menyalahgunakan jabatan yang diemban. Legitimasi kekuasaan bukan untuk menjadikan para pemangku pejabat publik untuk bertindak sewenang-wenang terhadap kekuasaan yang dipegang, melainkan untuk menjalankan tugas yang diemban dengan suatu standar etis yang baik.

3. Etika Dalam Perspektif Spinoza Dan Implikasinya Terhadap Politik Dan Demokrasi

Dalam menjelaskan etikanya, Spinoza menggunakan suatu metode geometris yang berarti bahwa segala sesuatu tindakan yang dilakukan oleh manusia dan alam dapat diukur, didekati, dan dijelaskan seperti ilmu pasti. Hal ini seperti yang telah dikatakan oleh Spinoza di awal bagian ketiga etika, ia menyatakan bahwa setiap mereka yang telah menulis tentang emosi dan perilaku manusia tampaknya memandang manusia sebagai kerajaan di dalam kerajaan, sebagai sesuatu yang berdiri terpisah dari dan di atas jalur biasa dari alam. Usulanya yakni memperlakukan manusia sebagai bagian dari alam dan untuk menganggap tindakan dan keinginan manusia persis seperti saya berurusan dengan garis, bidang dan tubuh. Sedangkan pada bagian terakhir, Spinoza memberikan penjelasan naturalistik tentang emosi manusia dan perilaku manusia. Ia juga menunjukkan bagaimana kebebasan dari belenggu nafsu dapat dicapai.

Setiap hal individu (dan bukan hanya manusia) berusaha untuk bertahan dalam keberadaannya sendiri; yang dinamakan dengan *conatus* dan *conatus* dipandang sebagai tendensi untuk mempertahankan diri. Teori moral atau etika Spinoza memberikan suatu perbedaan bahwa semua emosi berasal dari nafsu keinginan, kesenangan, dan rasa sakit yang mendasar.

Hal ini berarti bahwa setiap tindakan manusia sebagai bagian dari alam yang memiliki kecenderungan emosional dapat menjadi penyebab suatu tindakan yang berakibat pada baik atau buruknya tindakan tersebut dan dapat diberikan penilaian etis atas tindakan yang dilakukan. Etika Spinoza yang dikaitkan dengan emosi dapat juga berarti bahwa emosi dapat menimbulkan seseorang untuk memiliki ambisi yang besar yang dapat berakibat pada baik atau buruknya tindakan yang akan dilakukan. Dalam kaitannya dengan politik, emosi dapat menjadi penyebab dari kecurangan atau suatu perbuatan yang immoral karena emosi dapat menimbulkan ambisi untuk menghancurkan tatanan yang baik demi tujuan untuk kebikan dirinya sendiri. Emosi dalam kaitannya dengan etika juga dapat membuat seorang politisi untuk melakukan agitasi demi tercapainya tujuan dalam hal ini keinginan akan kekuasaan. Namun di sisi lain emosi dalam pandangan Spinoza, ia menyatakan bahwa emosi kita telah ditentukan, demikian juga penilaian kita tentang apa yang baik dan apa yang buruk.

Spinoza memandang dalam diri manusia ada hasrat yang disadari yakni nafsu yang disebut dengan *cupiditas*. Dengan adanya nafsu orang cenderung lebih mencari suatu vitalitas yang lebih tinggi atau lebih redah yakni kesenangan (*laetitia*). Ia juga membedakan refleksi dalam kesadaran dari transisi keadaan kesempurnaan ke keadaan yang lebih rendah yang disebut rasa sakit (*tristitia*). Dari pandangan Spinoza ini perlu membuat suatu perbedaan mengenai teori moral Spinoza, karena semua emosi pada dasarnya berasal dari keinginan, kesenangan, dan rasa sakit yang mendasar.

Dalam kaitannya dengan politik dan demokrasi, adanya nafsu (*laetitia*) dapat menimbulkan suatu keinginan untuk memuluskan kekuasaan dengan memanipulasi undang-undang dalam hal ini berkaitan dengan hukum yang hanya adil bagi sekelompok golongan tertentu atau bersifat oligarkis. Orang yang dibelenggu nafsu, dapat saja kehilangan suara hatinya yang adalah kesadaran kita akan kewajiban dan tanggung jawab seorang pribadi dalam horizon kemutlakan, artinya dalam kesadaran samar-samar bahwa Tuhan sedang menjadi saksi. Orang yang karena nafsunya dan kehilangan suara hati akan sulit membedakan mana sikap yang baik mana yang tidak baik. Keluhuran manusia ditentukan oleh suara hatinya yang berguna untuk membedakan antara apa yang baik dan yang tidak. Dalam ikhwal politik dan demokrasi, seseorang yang karena nafsunya dapat menjadi depolitis dan demokrasi akan mengalami regresi.

Berkaitan dengan nafsu dapat dilihat dalam politik dan demokrasi era Jokowi yang dapat dengan mudah mengubah peraturan hukum demi anaknya untuk maju dan mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Undang-undang dan hukum yang dengan mudah dirubah menandakan bahwa demokrasi yang di dalamnya ada keyakinan bahwa rakyat yang berdaulat dan bahwa setiap pemerintahan berada di bawah kekuasaan rakyat, tidak lagi diperlihatkan.

4. Apakah Jokowi Merusak Demokrasi?

Demokrasi merupakan pertanda bahwa kekuasaan tidak sepenuhnya dimiliki oleh sekelompok minoritas atau sekelompok elit yang memegang kekuasaan dan menjalankan tugas dari negara. Demokrasi sebagai media agar masyarakat dapat mengambil bagian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu masyarakat sebagai yang berdaulat, berhak untuk menginterupsi wewenang yang dipegang oleh pejabat publik, jika wewenang tersebut diselewengkan. Di era pemerintahan Jokowi muncul beberapa fenomena politik yang tidak etis yang menyebabkan demokrasi menjadi regresif. Hal tersebut dapat dilihat dengan fenomena ketidakadilan hukum dan hak asasi manusia yang diberlakukan untuk seluruh masyarakat. Prinsip *equality before the law* atau perlakuan yang sama di hadapan hukum tidak berlaku universal melainkan hanya berlaku untuk sebagian kaum oligarki yang dapat memainkan hukum.

Bukti bahwa pada masa kepresidenan Jokowi demokrasi mengalami regresi atau penurunan adalah kegagalan pemerintah untuk melindungi warga negara dalam hal ini meningkatnya pembungkaman untuk melemahkan masyarakat sipil yang memperjuangkan hak-haknya. Pembungkaman yang merusak demokrasi dilakukan dengan membubarkan diskusi hingga kriminalisasi. Tidak hanya gagal melindungi warga negara, pemerintah justru menjadi contoh buruk dengan melakukan berbagai pembangkangan hukum.

KESIMPULAN

Dinamika politik di era pemerintahan Jokowi menjadi salah satu topik yang marak diperbincangkan dan menuai berbagai kritik karena dapat menimbulkan sistem pemerintahan yang kontroversial, yakni suatu bentuk pemerintah yang bersifat oligarki atau berada tangan kaum elit. Selain sistem pemerintahan yang bersifat kontroversial hal lain yang dapat menyebabkan sistem demokrasi di Indonesia mengalami penurunan adalah masalah ketidakadilan hukum dan keterlibatan para penegak hukum dalam menangani berbagai kasus, terutama para politisi partai politik. Akibat dari permasalahan ini adalah demokrasi di Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis.

Hal ini terjadi karena para pemerintah dan juga para politis partai politik kurang memahami etika, terutama etika dalam berpolitik. Etika politik selalu berkaitan dengan

etika sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga para pimpinan, atau pemegang kekuasaan tidak menyalahgunakan jabatan yang diemban. Spinoza dalam etika politiknya menggunakan suatu geometris yang berarti bahwa suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia dan alam dapat diukur, dijelaskan dan didekati seperti ilmu pasti. Spinoza juga memandang bahwa dalam diri manusia ada hasrat yang disadari yaitu nafsu. Dengan adanya nafsu inilah yang membuat orang cenderung untuk mencari kesenangan atau selalu berpikir untuk menjadi penguasa. . Maka sebagai pemimpin negara harus mempunyai kesadaran tentang etika demi terciptanya suatu demokrasi yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Aulia dkk, Politik Dinasti Keluarga Presiden Jokowi, e-book, 2020
Copleston Frederick, Filsafat Spinoza, Penerj. Renanda Yafi Atolah, Yogyakarta, 2021
Haryatmoko, Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi, Yogyakarta, 2015
Januardi Aldo Felix , Mundurnya Demokrasi dan Kalahnya Negara Hukum Catatan Akhir Tahun Refleksi Hukum dan HAM Indonesia 2016, Jakarta, 2016
Magnis-Suseno Franz , Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta, 2023
Rasjidi Raihan, Metodologi Penelitian, Jakarta, 2019
Warbuton Eve dan Thomas Power , Demokrasi di Indonesia Dari Stagnasi ke Regresi?, Penerj. Usman Hamid Dkk, Jakarta, 2021